

Ideologi Dan Kepentingan Nasional Tiongkok Di Balik Inisiatif One Belt And One Road (OBOR)

Sahbuddin Dg. Palabbi ¹

Email Korespondensi: sahbuddinpalabbi2021@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui ideologi dan kepentingan nasional Tiongkok di balik pembentukan inisiatif OBOR. Landasan teori yang digunakan adalah teori liberalisme interdependensi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mengumpulkan bahan-bahan dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, tesis, media massa, ensiklopedia, dan website yang mendukung terhadap objek kajian yang diteliti. Adapun metode penulisan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik analisis data melalui 3 (tiga) jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara ideologi, pembentukan inisiatif OBOR merupakan perwujudan dari cita-cita masyarakat dan ambisi negara Tiongkok sebagaimana terdapat di dalam konsep "Chinese Dream". Inisiatif OBOR juga dimaksudkan untuk tercapainya kepentingan nasional Tiongkok yang secara garis besar memiliki 2 (dua) dimensi, yaitu dimensi ekonomi serta dimensi politik dan keamanan. Melalui instrumen OBOR dengan mekanisme kerja sama multilateral-nya, Tiongkok hendak mengupayakan keuntungan ekonomi yang maksimal untuk mendapatkan pengaruh politik yang lebih besar, sekaligus menstabilkan keamanan regional sebagai syarat utama dalam menjaga kebangkitan Tiongkok di bidang ekonomi dan politik internasional.

Kata Kunci: Liberalisme Interdependensi, Kepentingan Nasional, Ambisi Tiongkok, Ideologi Tiongkok, Inisiatif Sabuk dan Jalan

¹Program Studi Magister Hubungan Internasional, Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina, Jakarta

Pendahuluan

Pada bulan September 2013, Tiongkok memperkenalkan suatu kebijakan luar negeri baru berskala global dengan nilai investasi terbilang besar, yang dikenal dengan inisiatif One Belt, One Road atau disingkat dengan OBOR. Inisiatif OBOR yang belakangan penyebutannya dirubah menjadi Belt and Road Initiative (BRI) tersebut pada dasarnya merupakan sebuah jalur perdagangan dan ekonomi baru yang mengkoneksikan negara-negara di benua Asia hingga Eropa, yang pada zaman dahulu merupakan jalur yang sering dilewati oleh para pedagang dari Eropa menuju Tiongkok.

Hingga tahun 2019, OBOR telah beranggotakan 65 negara yang terdiri atas: 11 negara anggota ASEAN, 8 negara di Asia Selatan, 7 negara di Asia Tengah, 16 negara di Asia Barat dan Afrika Utara, 16 negara di Eropa Tengah dan Timur, 7 negara CIS dan tentu saja Tiongkok. Dengan sebanyak 890 proyek pada lebih dari 60 negara mitra, maka diperkirakan total investasi yang dikeluarkan untuk pendanaan mega proyek OBOR berkisar antara US\$800 miliar hingga US\$1 triliun (Gyi, 2019).

Prinsip utama di dalam OBOR terdiri atas 2 (dua) hal, yaitu One Belt dan One Road. One Belt merupakan rute perdagangan yang melalui jalur sutra ekonomi berbasis daratan (Silk Economic Road), yang membentang dari Tiongkok, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah hingga Eropa. Sedangkan, One Road merupakan jalur sutra berbasis laut (21st Century Maritime Silk Road) yang

menghubungkan Tiongkok, Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah sampai ke Eropa. Untuk mendukung konektivitas pada kedua jalur tersebut, maka fokus utama kerja sama OBOR adalah pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan raya, jaringan pipa, rel kereta api, pelabuhan laut dalam, bandara, kota baru, real estate, zona ekonomi khusus, jaringan listrik, serta logistik (Fahmi, 2018; Fahrizal dkk., 2019).

Jika ditelaah lebih lanjut, inisiatif OBOR yang digagas oleh pemerintahan Xi Jinping ini mencirikan bentuk kerja sama multilateral lintas kawasan dan ditengarai sebagai strategi Tiongkok dalam memperluas pengaruhnya di dunia (Ma'rus, 2021). Hal ini dapat dilihat dari tinjauan geografis, dimana jalur lintasan inisiatif OBOR yang mencapai lebih dari 60 negara, menunjukkan cakupan wilayah yang luasnya lebih besar dari Uni Eropa (Kurniawan, 2016). Sehingga dari kacamata globalisasi, bentuk kerja sama OBOR ini akan menciptakan efek borderless (seolah tidak ada batas-batas wilayah) bagi negara-negara yang dilalui jalur tersebut (Fahrizal dkk., 2019).

Pembentukan inisiatif OBOR tersebut juga dilandasi oleh 3 (tiga) aspek yaitu aspek historis, empiris dan praktis. Secara historis, jalur sutra merupakan jalur perdagangan yang sudah lama terbentuk, bahkan sejak ribuan tahun lamanya. Untuk itu, Tiongkok berinisiatif menghidupkan kembali jalur tersebut di masa kontemporer ini. Karena jalur itu sudah ada sejak lama, maka secara empiris, telah terbentuk dan tertanam nilai-nilai

yang baik di dalam diri masyarakat yang berada di sepanjang jalur sutra tersebut, seperti nilai perdamaian, kerja sama, keterbukaan, saling belajar serta saling menguntungkan. Nilai-nilai yang telah mengakar tersebut berdampak pada peningkatan pembangunan dan kemakmuran di negara-negara yang berada di jalur ini. Seiring perkembangan zaman, secara praktis, kondisi domestik dan internasional di negara-negara tersebut juga semakin rumit, yang kemudian diikuti dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia. Oleh karena itu, melalui OBOR, Tiongkok berinisiatif membangun kembali jalur sutra tersebut dengan maksud agar negara-negara yang terletak di jalur itu dapat selalu menjalin kerja sama yang saling menguntungkan guna menghadapi berbagai tantangan global di berbagai bidang, baik itu di bidang ekonomi, sosial maupun politik internasional (Fahrizal dkk, 2019).

Kerja sama dan harmonisasi yang ingin dibangun oleh Tiongkok melalui inisiatif OBOR ini sejalan dengan prinsip liberalisme. Menurut para penganut paradigma liberalisme, keinginan aktor untuk menjalin kerja sama tersebut muncul karena pada dasarnya manusia memiliki sifat dasar yang baik yaitu menyukai perdamaian. Atas dasar hal tersebut, maka harmoni antar bangsa tidak hanya dapat dicapai, tetapi diinginkan. Di tingkat internasional, lembaga dan organisasi berperan dalam membatasi kekuasaan negara dengan membina kerja sama (Mcglinchey et al., 2017).

Tentu saja, apa yang diupayakan oleh Tiongkok melalui inisiatif OBOR tersebut juga tidak lepas dari keinginannya untuk mendapatkan keuntungan. Karena melalui pembangunan berbagai infrastruktur dan sarana di sepanjang jalur sutra

tersebut dalam kerangka kerja sama OBOR, maka transaksi keuangan senilai triliun dolar bisa terjadi. Hal ini menunjukkan keberhasilan sistem ekonomi kapitalisme yang diusung Tiongkok.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Tiongkok menggunakan kekuatan ekonomi dan keuangannya dengan cara berinvestasi pada pembangunan infrastruktur di sepanjang jalur sutra tersebut, disamping tentunya juga memberikan bantuan ekonomi, serta pinjaman atau hutang kepada negara lain yang menjadi mitranya. Dalam hal ini, Tiongkok selalu mencari kesempatan untuk dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak atas negara yang lain (Heriamsal dkk., 2021).

Sementara itu, kajian ekonomi-politik memandang bahwa inisiatif OBOR yang dicetuskan oleh Tiongkok ini antara lain merupakan upaya Tiongkok dalam mengamankan pasokan energi dari Laut Tiongkok Selatan dan Samudera Hindia, strategi untuk menyeimbangkan kekuatan ekonomi dan meningkatkan kerja sama multilateral dalam pembangunan infrastruktur (Kurniawan, 2016). Untuk itu, dengan mengkaji berbagai literatur yang ada, maka penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek ideologi dan kepentingan nasional Tiongkok di balik pembentukan inisiatif OBOR tersebut.

Metode Penelitian

Metode yang dipilih adalah kualitatif deskriptif, yaitu sebuah metode yang berusaha mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan

yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 2006). Alasan pemilihan metode ini karena penulis ingin memaparkan secara jelas bagaimana ideologi dan kepentingan nasional Tiongkok di balik pembentukan inisiatif OBOR.

Adapun pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data teoritis melalui bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, tesis, media massa, ensiklopedia, dan website yang mendukung terhadap objek kajian yang diteliti.

Data kualitatif tentang ideologi dan kepentingan nasional Tiongkok di balik pembentukan inisiatif OBOR dianalisa menggunakan tiga jalur analisis data kualitatif sesuai metode Miles & Huberman (1992) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusur tema dan membuat gugus-gugus. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), ataupun berupa matriks, grafik dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang disusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang

terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya harus melakukan analisis ulang.

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan pokok sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Pembahasan

Ideologi

Perilaku suatu negara dalam politik internasional dipengaruhi oleh politik domestiknya yang pada dasarnya ditujukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara tersebut (*survival of the state*). Dalam kasus Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok bertanggung jawab dalam memastikan kelangsungan hidup serta arah tujuan Tiongkok untuk menjadi negara maju di dunia (Widjaja, 2020).

Sumberdaya alam yang melimpah serta didukung oleh sumberdaya manusia yang mumpuni baik kualitas maupun kuantitasnya, menjadi modal penting bagi Tiongkok dalam membangun kekuatan nasional negara tersebut. Akan tetapi, ideologi komunis dan sistem ekonomi sosialis yang dianut oleh Tiongkok di masa pemerintahan Mao Zedong, menyebabkan Tiongkok menjadi negara yang terisolasi, sehingga kekuatan nasional yang dimilikinya tidak dapat berfungsi maksimal bagi peningkatan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat Tiongkok (Heriamsal dkk., 2021; Widjaja, 2020).

Perubahan terjadi pada masa pemerintahan Deng Xiaoping di tahun 1978 dengan dikeluarkannya kebijakan 'Open Door Policy' atau

reformasi ekonomi, dari sistem ekonomi sosialis menjadi kapitalisme. Kebijakan tersebut menjadikan Tiongkok lebih terbuka dalam menjalin hubungan internasional sekaligus menandai dijadikannya ekonomi sebagai landasan kebijakan luar negeri Tiongkok. Sejak saat itu, investasi asing di Tiongkok mengalami peningkatan yang signifikan, yang membuat pertumbuhan ekonomi negara ini juga ikut meningkat, dari satu persen menjadi lebih dari sepuluh persen tiap tahunnya. Hal itu membawa perubahan signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga menumbuhkan kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin Tiongkok (Heriamsal dkk., 2021; Widjaja, 2020).

Kepercayaan masyarakat kepada presiden serta Partai Komunis Tiongkok terus dipertahankan melalui kemunculan ideologi yang bersumber dari ajaran konfusianisme. Kebijakan reformasi ekonomi Deng Xiaoping diteruskan di masa-masa kepemimpinan presiden selanjutnya melalui berbagai macam slogan yang secara emosional memiliki kedekatan dengan masyarakat, seperti di masa presiden Hu Jintao dengan konsep "Peaceful Development", hingga presiden Xi Jinping pada tahun 2013 dengan slogan kebijakan "Chinese Dream" (Heriamsal dkk., 2021).

Chinese Dream merupakan penjabaran dari cita-cita masyarakat dan negara Tiongkok. Untuk menggapai cita-cita tersebut, Tiongkok perlu membenahi permasalahan yang terjadi di dalam negerinya sendiri seperti kasus separatis, produksi melebihi kapasitas, pengangguran, dan berkurangnya cadangan sumberdaya energi seperti minyak dan gas (Widjaja, 2020).

Berdasarkan cita-cita Tiongkok yang tertuang dalam Chinese Dream, serta dalam rangka mengatasi permasalahan domestik negara tersebut, maka diajukanlah strategi besar Tiongkok melalui inisiatif OBOR. OBOR juga dilihat sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Dengan kata lain, inisiatif OBOR merupakan pengejawantahan dari slogan "Chinese Dream". Inisiatif itu lahir dari cita-cita dan visi Tiongkok yang disatukan dalam "Chinese Dream" oleh Presiden Xi Jinping (Heriamsal dkk., 2021; Widjaja, 2020).

Inisiatif OBOR juga menggambarkan ambisi Tiongkok dalam memenuhi cita-citanya yang terdapat di dalam Global Chinese Dream. Cita-cita dan ambisi tersebut ditujukan untuk dapat menjamin kelangsungan hidup negara Tiongkok sendiri (Widjaja, 2020). Kebijakan ini sekaligus mengukuhkan Tiongkok menjadi negara yang aktif dalam mewujudkan visi misi yang dirumuskan oleh Presiden Xi Jinping. Tercapainya stabilitas dan diperolehnya legitimasi rakyat Tiongkok terhadap kepemimpinan Xi Jinping dan Partai Komunis Tiongkok, merupakan kepentingan ideologi yang ingin diraih melalui inisiatif OBOR tersebut (Heriamsal dkk., 2021).

Idelologi kebangkitan Tiongkok melalui slogan "Chinese Dream" juga dinilai mampu membangkitkan jiwa nasionalisme rakyat Tiongkok. Hal itu sekaligus menjadi media bagi Partai Komunis Tiongkok untuk mengingatkan rakyat Tiongkok akan kebangkitan negara itu dari penjajahan atau kolonialisme di masa lalu (Heriamsal dkk., 2021).

Jika ditelaah lebih lanjut, slogan atau prinsip Chinese Dream (zhongguo meng) tersebut juga menawarkan

suatu pola hubungan internasional baru antara kutub-kutub kekuatan besar di dunia (Widjaja, 2020). Chinese Dream juga merupakan cerminan dari kebijakan Tiongkok dalam mencapai cita-cita negaranya yang berisi 5 kategori, yang 3 (tiga) diantaranya adalah:

Personal Chinese Dream adalah cita-cita setiap warga negara Tiongkok untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik (material) dan psikologi (mental). Kebutuhan fisik atau material antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, keamanan, pendidikan, kesehatan dan jaminan masa tua.

National Chinese Dream adalah cita-cita nasional Tiongkok dalam mencapai sasaran nasionalnya, yang dikenal dengan "Two 100s". Konsep ini mengandung 2 (dua) tujuan/sasaran utama, yaitu: (1) meningkatnya tingkat kemakmuran masyarakat Tiongkok pada tahun 2020, dimana semua warga negara Tiongkok memiliki kehidupan yang layak, dengan indikator GDP perkapita sebesar USD 10.000; (2) menjalankan modernisasi dalam rangka menjadikan Tiongkok sebagai negara maju pada tahun 2050, bertepatan dengan ulang tahun ke-100 negara Tiongkok.

Global Chinese Dream yaitu cita-cita global Tiongkok, yang terdiri atas 2 (dua) sub kategori: (1) menjadi pemimpin ekonomi global, yang dapat memberikan keuntungan bagi dunia karena jumlah penduduknya yang besar dapat menciptakan banyak lapangan kerja, sehingga tercapai kemakmuran dunia; (2) memajukan taraf hidup domestik dengan menciptakan perdamaian demi tercapainya kemakmuran domestik.

Kepentingan Nasional

Pada dasarnya kepentingan nasional Tiongkok melalui inisiatif OBOR dapat dikelompokkan ke dalam

2 (dua) kategori utama, yaitu: (1) Kepentingan Ekonomi dan (2) Kepentingan Politik dan Keamanan. Kedua dimensi kepentingan nasional itu saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dan biasanya secara bersamaan menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya. Sistem ekonomi internasional dipengaruhi oleh sistem politik internasional dalam waktu bersamaan, begitu juga sebaliknya. Perilaku dan kebijakan pemerintah suatu negara dalam bidang ekonomi umumnya dipengaruhi oleh kondisi politik domestiknya sendiri, yang kemudian menentukan struktur politik internasional (Widjaja, 2020). Berikut ini diuraikan masing-masing kepentingan nasional Tiongkok di balik inisiatif OBOR.

Kepentingan Ekonomi

Meningkatkan perekonomian negara Tiongkok merupakan salah satu kepentingan nasional Tiongkok yang ingin diwujudkan melalui inisiatif OBOR. Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok, Zeng Peiyan, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok dapat mencapai hingga 8% per tahun, hanya jika investasi infrastruktur tumbuh 15% sampai dengan 18% per tahun. Alasannya bahwa ketersediaan infrastruktur dapat mengurangi tingginya biaya produksi dan biaya transportasi barang dan jasa, serta dapat meningkatkan keuntungan dan memperlancar siklus bisnis. Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok merasa perlu membuat sebuah jalur transportasi baru yang menghubungkan negara-negara di dunia dari Asia hingga ke Eropa, yang kemudian dibingkai dalam kerangka inisiatif OBOR (Fahmi, 2018).

Selain ditujukan untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri Tiongkok itu sendiri, pembentukan inisiatif OBOR juga dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan nasional Tiongkok yang lebih besar, yaitu menjadi kekuatan ekonomi dunia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Tiongkok dengan negara-negara mitra selama beberapa tahun berlalunya inisiatif OBOR. Kerja sama tersebut umumnya dilakukan dalam pembangunan infrastruktur publik (Fahmi, 2018).

Pembangunan infrastruktur publik tersebut, tentunya diharapkan akan mendatangkan manfaat yang besar bagi Tiongkok, misalnya proyek pipa dengan Myanmar yang menjadi akses terhadap minyak mentah Timur Tengah, Pelabuhan Piraeus dengan Yunani yang akan menjadi gerbang maritim di Eropa Tengah, serta Pelabuhan Gwadar dengan India yang dapat membuka akses dan rute perdagangan Tiongkok di wilayah Barat Daya Provinsi Xinjiang (Fahmi, 2018; Gyi, 2019).

Inisiatif OBOR juga akan membuka akses ke Samudra Hindia, khususnya bagi Provinsi Xinjiang dan Yunnan, yang selama ini kurang berkembang karena terkurung daratan. Berkaitan dengan hal tersebut, OBOR juga dapat dilihat sebagai program yang sengaja diciptakan pemerintah Tiongkok untuk mendukung China's Western Development Program, yaitu sebuah rencana pembangunan yang dibuat pada tahun 1999 untuk menggenjot perekonomian di 12 provinsi di bagian Barat Tiongkok, yaitu Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet, Shaanxi, Gansu, Ningxia, Xinjiang, Inner Mongolia, Guangxi dan Qinghai (Fahmi, 2018).

Dari perspektif politik domestik, inisiatif OBOR merupakan pilihan rasional bagi pemerintah Tiongkok untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi provinsi-provinsi di dalam negerinya sendiri. Karena selama ini, masing-masing provinsi tersebut telah menjalin hubungan perekonomian dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok bermaksud menyalurkan hubungan perekonomian tersebut dalam bingkai inisiatif OBOR, sehingga dapat memberi keuntungan maksimal secara agregat bagi perekonomian Tiongkok (Kurniawan, 2016).

Kerja sama ekonomi yang ingin dibangun Tiongkok dengan negara-negara mitra tersebut, tidak saja bertujuan untuk meningkatkan arus ekonomi/perdagangan bebas, efisiensi alokasi sumberdaya, serta integrasi pasar, namun juga ditujukan untuk membangun kerja sama ekonomi regional yang bermanfaat bagi perekonomian dunia. Melalui inisiatif OBOR diharapkan terjadi peningkatan arus modal serta barang jasa dari Asia ke seluruh dunia yang melibatkan peran Usaha Kecil Menengah (UKM) hingga perusahaan multi nasional (Fahmi, 2018).

Untuk itu, pemerintah Tiongkok membangun 6 (enam) koridor ekonomi yang dikenal dengan nama jalur sutra ekonomi (silk economy road), yaitu: (1) Koridor Ekonomi Jembatan Darat Eurasia Baru; (2) Koridor Ekonomi Tiongkok-Mongolia-Rusia; (3) Koridor Ekonomi Tiongkok-Asia Tengah-Asia Barat; (4) Koridor Ekonomi Semenanjung Tiongkok-Indochina; (5) Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan; dan (6) Koridor Ekonomi Bangladesh-Tiongkok-India-Myanmar (Gyi, 2019).

Analisis lain menyebutkan bahwa inisiatif OBOR yang bernilai miliaran dolar tersebut merupakan bentuk

kampanye massif yang dilakukan Tiongkok dalam rangka melakukan dominasi global, serta untuk mendukung investasi Tiongkok di seluruh dunia melalui paket stimulus ekonomi. Pendapat ini cukup beralasan, karena sepanjang tahun 2014 dan 2016, total volume perdagangan Tiongkok di negara-negara sepanjang jalur OBOR sudah melebihi US\$ 3 triliun (Gyi, 2019).

Sepak terjang Tiongkok juga ditunjukkan melalui upayanya menggunakan mata uang negaranya sendiri, yaitu "Yuan" di sepanjang jalur OBOR tersebut. Upaya itu mengundang kritikan dari berbagai pihak yang menuding bahwa OBOR merupakan bentuk "Rencana Marshall" Tiongkok. Muncul dugaan akan adanya motif lain di balik pembentukan OBOR yang diinisiasi oleh Presiden Xi Jinping tersebut. Asumsinya bahwa OBOR dibentuk dengan tujuan untuk membidik peluang bisnis yang memberikan keuntungan besar bagi beberapa perusahaan BUMN Tiongkok, khususnya yang bergerak di bidang infrastruktur, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan PDB Tiongkok. Hal ini didukung oleh data-data perekonomian bahwa selama tahun 2018, lima tahun setelah OBOR didirikan, perusahaan-perusahaan Tiongkok telah berhasil meraup keuntungan hingga lebih dari US\$ 340 miliar melalui kontrak pekerjaan konstruksi di negara-negara Asia (Gyi, 2019).

Tiongkok juga telah menggelontorkan miliaran dolar AS untuk investasi dalam proyek-proyek infrastruktur dasar di negara-negara Asia Selatan seperti Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Investasi tersebut membuahkan hasil dengan semakin

meluasnya perdagangan dan investasi Tiongkok hingga ke India, dimana investasi Tiongkok juga bertumbuh dengan cepat dari tahun ke tahun di negara itu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa inisiatif OBOR bukan hanya dimaksudkan untuk melakukan ekspansi perdagangan, tetapi juga menjadi kebutuhan Tiongkok menyalurkan kelebihan kapasitas produksi dari dalam negeri ke negara-negara lain yang menjadi bagian dari inisiatif OBOR (Gyi, 2019).

Pendapat lain menyatakan bahwa pembangunan koridor-koridor ekonomi dalam jalur sutra ekonomi OBOR, pada dasarnya ditujukan untuk mendukung dan meningkatkan kerja sama ekonomi Tiongkok, khususnya dengan negara-negara di kawasan Asia Tengah. Kawasan ini penting bagi Tiongkok, seiring dengan meningkatnya pengaruh politik global Tiongkok yang selama ini dipersepsikan menjadi potensi ancaman bagi negara-negara di kawasan tersebut. Munculnya persepsi ini tentu tidak lepas dari manuver politik yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Tengah dalam menjaga hubungannya dengan Tiongkok (Kurniawan, 2016).

Pendapat senada diutarakan oleh beberapa ahli lainnya yang menyatakan bahwa berbagai kerja sama yang dilakukan Tiongkok dalam kerangka OBOR itu merupakan bentuk strategi kebijakan luar negeri Tiongkok untuk menguasai perekonomian dunia, khususnya di Asia, serta dimaksudkan juga untuk menyaingi pengaruh Amerika Serikat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa posisi tawar Tiongkok akan mengalami peningkatan signifikan dengan adanya inisiatif OBOR ini. Melalui kerja sama dalam bidang ekonomi yang terjalin dengan baik tersebut, maka Tiongkok akan

memiliki akses yang mudah terhadap negara-negara di sepanjang jalur OBOR, mulai dari Asia hingga ke Eropa, yang tentunya akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi Tiongkok melalui berbagai proyek kerja sama ekonomi (Fahmi, 2018).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa OBOR sebagai instrumen ekonomi yang diinisiasi oleh Tiongkok, pada dasarnya ditujukan untuk tercapainya kepentingan Tiongkok yang lebih tinggi, yaitu untuk memperluas pengaruhnya melalui ketergantungan ekonomi yang timbul dari pelaksanaan OBOR tersebut. Dengan adanya interdependensi ekonomi, maka dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi Tiongkok (Widjaja, 2020).

Fahmi (2018) mengemukakan bahwa berdasarkan tujuan pendiriannya, inisiatif OBOR memiliki 4 (empat) konsep utama, yaitu: (1) kerja sama; (2) saling menguntungkan; (3) pengembangan; dan (4) perdamaian. Konsep ini sejalan dengan pemahaman kaum liberalisme yang memandang bahwa inisiatif OBOR yang digagas oleh Tiongkok ini merupakan bentuk kerja sama ekonomi yang mencirikan liberalisme interdependensi (saling ketergantungan).

Asumsi dasar liberalisme interdependensi yaitu modernisasi dapat meningkatkan ruang lingkup dan tingkat saling ketergantungan antar negara. Melalui interdependensi yang bersifat kompleks, peran aktor transnasional menjadi penting. Di sisi lain, kekuatan militer menjadi kurang penting, sehingga kesejahteraan menjadi tujuan utama masing-masing negara (Jackson dan Sorensen, 2013). Hal ini dapat dilihat dari kemajuan yang diperoleh selama beberapa tahun

terbentuknya inisiatif OBOR. Masing-masing negara yang tergabung dalam mega proyek OBOR tersebut melakukan hubungan kerjasama dengan Tiongkok dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang diyakini dapat meningkatkan arus perekonomian negara, dan pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan negara tersebut.

Liberalisme juga memandang bahwa dengan meningkatnya kerja sama perekonomian antar negara dalam rangka mencapai kesejahteraan, maka akan terjadi penurunan penggunaan kekuatan militer sebagai alat politik luar negeri (Kurniawan, 2016). Melalui kerja sama dalam bidang ekonomi, negara-negara yang menjalin hubungan kerja sama umumnya akan: (1) saling bergantung satu dengan yang lain, (2) membuat peraturan yang disepakati bersama untuk mengatur perilaku setiap negara, serta (3) membentuk lembaga internasional untuk memastikan dijalankannya peraturan yang telah dibuat tersebut. Pada akhirnya, ketiga hal tersebut akan membentuk dinamika politik keamanan yang lebih mudah untuk diprediksi, serta dapat mengurangi kesalahpahaman di antara negara-negara. Dengan demikian, maka situasi yang mengarah kepada konflik lebih mudah untuk dihindari dan perdamaian dunia akan terbentuk. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa interdependensi ekonomi dalam inisiatif OBOR juga berpengaruh terhadap menurunnya konflik antar negara (Kurniawan, 2016).

Kepentingan Politik dan Keamanan

Sebagaimana telah diutarakan di atas bahwa kepentingan ekonomi cenderung bersamaan dan tidak dapat

dipisahkan dengan kepentingan politik dan keamanan. Atau dengan kata lain bahwa kepentingan ekonomi memiliki urgensi yang sama dengan kepentingan politik. Demikian juga dalam kaca mata liberalisme yang menitikberatkan pada pentingnya aspek ekonomi yang seringkali menjadi tujuan utama dalam kerja sama antar negara. Kerja sama dalam bidang ekonomi tersebut juga dimaksudkan dalam rangka tercapainya kepentingan keamanan bersama. Selanjutnya, kepentingan keamanan tersebut akan mendukung terwujudnya sistem internasional yang lebih stabil.

Dalam konteks Tiongkok dengan instrumen OBOR-nya, maka dapat dicermati bahwa Tiongkok sedang mengupayakan keuntungan ekonomi maksimum untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih besar. Kerja sama ekonomi yang dibangun Tiongkok melalui OBOR hanya merupakan alat dalam mencapai kepentingan politik dan keamanan, baik secara domestik di masing-masing negara mitra, maupun dalam lingkup internasional (Widjaja, 2020).

Inisiatif OBOR juga dipandang sebagai agenda Tiongkok dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan. Alasannya karena stabilitas keamanan menjadi syarat utama yang diperlukan untuk menjaga kebangkitan Tiongkok dalam politik internasional. OBOR juga dapat menjadi strategi besar Tiongkok dalam rangka melebarkan pengaruh politiknya di dunia, baik itu di kawasan Asia, Afrika, hingga ke Eropa (Widjaja, 2020).

Mengasumsikan inisiatif OBOR sebagai agenda keamanan Tiongkok merupakan perspektif yang didasarkan atas kenyataan bahwa kebangkitan Tiongkok secara ekonomi maupun politik internasional saat ini,

merupakan dampak positif dari dinamika politik dan keamanan internasional di kawasan. Itulah mengapa, Tiongkok perlu memelihara status quo tersebut, sehingga pilihan yang paling rasional adalah dengan membuat suatu terobosan di bidang ekonomi yang kemudian dimanifestasikan melalui OBOR (Kurniawan, 2016).

Digagasnya pembentukan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 dalam inisiatif OBOR juga bertujuan untuk memenuhi kepentingan stabilitas keamanan regional. Hal ini didasarkan atas ketergantungan Tiongkok terhadap kawasan Asia Tenggara, sehingga diharapkan melalui jalur sutra maritim tersebut maka dapat tercapai stabilitas keamanan maritim di Laut Tiongkok Selatan. Jalur ini juga ditujukan untuk menghilangkan persepsi negatif guna memperbaiki hubungan Tiongkok dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Invasi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan menunjukkan langkah strategis Tiongkok mencapai hegemoni di kawasan ini (Prawira, 2019). Apabila dikaitkan dengan konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan tersebut, maka Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 ini terlihat sebagai upaya Tiongkok untuk meredam konflik di wilayah perairan yang menjadi sengketa dengan negara-negara di Asia Tenggara tersebut.

Meskipun memang jika dilihat secara mendalam bahwa tidak ada suatu tawaran baru dalam inisiatif Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 tersebut, namun tawaran itu dikemas dengan bahasa yang lunak, yang menjanjikan keuntungan ekonomi, serta pengaturan keamanan yang menguntungkan bagi negara-negara Asia Tenggara (Fahrizal dkk., 2019).

Berdasarkan tujuan itu dapat dilihat bahwa apa yang diupayakan Tiongkok tersebut sejalan dengan prinsip liberalisme interdependensi. Dalam interdependensi, keberhasilan suatu negara dalam bekerjasama dengan negara lain berpijak pada dua hal, yakni power, kemampuan tawar-menawar dan rezim internasional (Perwita dan Yani, 2005). Dalam hal ini, Tiongkok memanfaatkan kekuatan dan kemampuan tawar-menawarnya melalui proyek OBOR demi tercapai kepentingan nasionalnya, tetapi juga menguntungkan bagi negara lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa interdependensi dapat terjadi dalam berbagai isu, seperti ekonomi, politik dan sosial (Perwita dan Yani, 2005).

Selain itu, adanya perebutan pengaruh dan kekuasaan di wilayah Asia antara Tiongkok dan Amerika Serikat ditengarai menjadi faktor yang mendorong pembentukan inisiatif OBOR. Lewat inisiatif OBOR, Tiongkok berupaya melakukan depolitisasi kompetisi politiknya dengan Amerika Serikat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kampanye program pembangunan ekonomi kawasan melalui mekanisme kerja sama multilateral. Dengan mekanisme yang menuntut peran aktif negara-negara yang terlibat di dalamnya, maka inisiatif OBOR menjadi strategi defensif Tiongkok dengan mengedepankan kontribusi negara-negara lain (Fahrizal dkk., 2019). Mekanisme kerja sama multilateral tersebut menjadi cara yang dilakukan Tiongkok untuk mengajak partisipasi aktif negara-negara di kawasan dengan berbagi peran dalam meningkatkan stabilitas keamanan kawasan, dimana kerja sama ekonomi menjadi sektor penjuror (Kurniawan, 2016).

Untuk itu, inisiatif OBOR Tiongkok yang terdiri dari Jalur Sutra

Ekonomi dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 tidak terlepas dari upaya pemerintah Tiongkok mewujudkan kepentingan keamanan tersebut dalam meningkatkan stabilitas regional. Hal tersebut diwujudkan melalui mekanisme kerja sama dengan negara-negara di kawasan, yaitu kerja sama dalam bidang ekonomi seperti kerja sama keuangan dan proyek infrastruktur, serta meningkatkan kerja sama dalam bidang keamanan perdagangan maritim (Fahrizal dkk., 2019; Kurniawan, 2016).

Dalam ruang lingkup yang lebih luas, OBOR memiliki dampak besar pada struktur pemerintahan dan kekuasaan global seperti halnya Marshall Plan (Rencana Marshall). Kedua rencana tersebut (OBOR dan Marshall Plan) sangat ambisius dalam tujuan geopolitik yakni ingin melakukan perubahan pada struktur kekuatan global melalui kebijakan ekonomi masing-masing. Kaitannya dengan itu, OBOR berupaya melawan tatanan global yang sudah terbentuk pasca perang dunia II oleh AS melalui "konsensus Washington" dengan menciptakan tatanan global baru yang dibangun di atas pembangunan infrastruktur skala global (Ma'rus 2021).

Inisiatif OBOR juga digunakan Tiongkok sebagai strategi untuk melakukan aliansi dengan negara-negara lain yang selama ini menjadi sumber ancaman, yaitu Rusia dan negara-negara di kawasan Eropa. Konektivitas perdagangan dengan negara-negara di kedua wilayah tersebut merupakan bentuk konektivitas antara basis manufaktur utama dunia dengan wilayah pengeksport minyak dalam jalur sutera modern ala OBOR, dimana hal ini menunjukkan makna geo-ekonomi dan geopolitik yang dalam. Hubungan

perdagangan itu juga memberikan implikasi politik, khususnya implikasinya terhadap Barat, dalam hal ini Amerika Serikat (Ma'rus, 2021). Jadi dapat dikatakan bahwa OBOR menjadi strategi geopolitik Tiongkok (Widjaja, 2020).

Selanjutnya, kedua proyek besar OBOR Tiongkok yaitu Jalur Sutra Ekonomi dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21, pada dasarnya akan menuju pada satu tujuan utama Tiongkok, yaitu menjadi kekuatan terbesar di dunia dan menjadi pemimpin dunia, sebagaimana tercantum dalam Global Chinese Dream. Namun demikian, keinginan dominasi tersebut dibalut dengan prinsip liberalisme yaitu memberikan keuntungan bagi dunia sehingga tercapai kemakmuran dunia. Hal inilah yang menyebabkan negara-negara lain melihat inisiatif OBOR Tiongkok bukan sebagai sesuatu yang menakutkan (Widjaja, 2020).

Secara keseluruhan, inisiatif OBOR terlihat sebagai upaya komprehensif Tiongkok mewujudkan kepentingan keamanan negaranya. Dalam konteks ini, Tiongkok bukan hanya ingin mengamankan jalur laut di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Tetapi juga mengupayakan jalur alternatif melalui jalur darat untuk memangkas waktu tempuh transportasi untuk berbagai komoditas pentingnya. Melalui jalur-jalur alternatif yang dibangun dalam koridor ekonomi OBOR, Tiongkok hendak menjadikan hubungan perdagangannya yang selama ini sudah terjalin dengan negara-negara lain tidak terlalu bergantung terhadap jalur transportasi maritim yang memiliki masalah keamanan (Kurniawan, 2016).

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa inisiatif OBOR Tiongkok yang terdiri dari 2 (dua) prinsip utama tersebut merupakan

upaya pemerintah Tiongkok untuk mewujudkan kepentingan politik dan keamanannya. Pemerintah Tiongkok menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai kepentingan tersebut adalah dengan meningkatkan stabilitas regional melalui kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara tetangganya (Kurniawan, 2016). Hal ini tentu saja sejalan dengan prinsip liberalisme interdependensi yang memandang bahwa negara-negara dengan masing-masing kepentingan nasionalnya akan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Tidak ada suatu negara pun yang secara keseluruhan dapat memenuhi sendiri kebutuhannya, masing-masing bergantung pada sumberdaya dan produk dari negara lainnya. Untuk itu, negara-negara tersebut akan saling bekerja sama dalam rangka pemenuhan kepentingan nasionalnya, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun keamanan (Perwita dan Yani, 2005).

Penutup

Kesimpulan

Pada dasarnya inisiatif OBOR merupakan manifestasi dari slogan "Chinese Dream" yaitu penjabaran dari cita-cita masyarakat dan negara Tiongkok. Cita-cita tersebut terdiri atas 5 (lima) kategori, dimana 3 (tiga) diantaranya adalah Personal Chinese Dream, National Chinese Dream dan Global Chinese Dream. Inisiatif OBOR menggambarkan ambisi Tiongkok dalam memenuhi cita-citanya yang terdapat di dalam Global Chinese Dream, yaitu menjadi pemimpin dunia yang tetap memberikan keuntungan bagi dunia yaitu menuju kemakmuran dan perdamaian dunia.

Berdasarkan kepentingan nasionalnya, pembentukan OBOR oleh Tiongkok memiliki 2 (dua) dimensi

kepentingan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, yaitu kepentingan ekonomi serta kepentingan politik dan keamanan. Tiongkok dengan kepentingan ekonominya berkeinginan untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian Tiongkok dalam skala domestik maupun internasional sekaligus menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia. Sedangkan dalam bidang politik dan keamanan, pembentukan OBOR merupakan strategi Tiongkok untuk menjadikan negaranya sebagai negara yang berpengaruh secara politik, sekaligus untuk memenuhi kepentingan keamanan demi terwujudnya stabilitas regional, yang dapat menjaga kebangkitan ekonomi dan politik internasional Tiongkok.

Daftar Pustaka

Baradat, L.P. (1997). "Political Ideologies: Their Origins and Impact." Prentice Hall.

Dugis, V. (2016). "Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik." Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.

Fahmi, R.A. (2018). "Pengaruh Inisiatif Obor (One Belt One Road) Tiongkok Terhadap Perkembangan Infrastruktur Indonesia Tahun 2017." Skripsi. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43471/1/iRHINAN DA%20AVIFA%20FAHMI-FISIP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43471/1/iRHINAN%20AVIFA%20FAHMI-FISIP.pdf).

Fahrizal, M., Yudilla, A., dan R. Sundari. (2019). "Implementasi Konsep Kebijakan One Belt One Road (Obor) China dalam Kerangka Kerjasama Pembangunan Infrastruktur di Indonesia." *Journal of Diplomacy and International Studies* 2 (2): 77-96.

[https://doi.org/10.25299/jdis.2019.vol2\(02\).5138](https://doi.org/10.25299/jdis.2019.vol2(02).5138).

Gyi, M. (2019). "The Belt and Road Initiative (BRI) and Its Implication on Myanmar." *Mandalay University of Foreign Languages Journal* 10 (1): 106-113.
<https://www.mufl.edu.mm/images/pdf/Research2019/2019MiMiGyi-106-113.pdf>

Heriamsal, K., Amin, A., & M.R. Prawira. (2021). "Analisis Kepentingan Tiongkok dalam Kebijakan Belt and Road Initiative di Pakistan." *Indonesian Journal of Peace and Security Studies* 3(2): 32-46.
<https://doi.org/10.29303/ijpss.v3i2.82>.

Jackson, R. & G. Sorensen. (2013). "Introduction to International Relations, Theories and Approaches." Fifth Edition. Oxford University Press.

Kurniawan, Y. (2016). "One Belt One Road (OBOR): Agenda Keamanan Liberal Tiongkok?" *Jurnal Politica* 7 (2): 233-254.
<http://dx.doi.org/10.22212/jp.v7i2.1135>

Ma'rus, R.I. (2021). "One Belt, One Road and The World: How China is Mastering The World's Migration Patterns?" *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 4 (2): 71-86.
<https://doi.org/10.52617/jikk.v5i2.259>.

McGlinchey, S., Walters, R., & C. Scheinpflug. (2017). "International Relations Theory." England: E-International Relations Publishing.

Miles, M.B. & A.M. Huberman. (1992). "Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods." Beverly Hills: SAGE.

Perwita, A.A.B. dan Y.M. Yani. (2005). "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional." Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Prawira, M. R. (2019). South China Sea Dispute. *Jurnal Dinamika Global*,

3(2), 35–54.
<https://doi.org/10.36859/jdg.v3i02.75>,
Rudy, T.M. (2002). “Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin.” Bandung: Refika Aditama.
Sukmadinata, N.S. (2006). “Metode Penelitian Pendidikan.” Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Widjaja, M. (2020). “Ekonomi Politik Inisiatif One Belt One Road Tiongkok.” Verity Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) 11 (21): 6-15.
<http://dx.doi.org/10.19166/verity.v11i21.2448>.